

The Development of the Dutch Colonial Settlement in the City of Yogyakarta after the Implementation of the Decentralisatie Wet Policy (1903-1942)

Dimas Wihardyanto ^{1*}, Ahmad Sarwadi ², Achmad Djunaedi ³

^{1,2}Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Jalan Grafika 2 Sekip, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281

³Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Jalan Grafika 2 Sekip, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281

*Penulis Korespondensi: dimas@ugm.ac.id

Abstract: Decentralization wet or the law on decentralization of development was one of the policies that had a significant effect on the development of Indonesia during the Dutch colonial period, including residential areas for Europeans. This study tries to reveal the pattern of development of Dutch colonial settlements in the city of Yogyakarta by using interpretative historical research methods on cartographic, architectural, and textual archival data that are relevant to the research theme. Based on the results of the analysis conducted by the researcher, it is known that the growth of the Dutch colonial settlement area in the city of Yogyakarta after the application of decentralization wet began with the emergence of residential areas supporting rail transportation facilities and followed by residential areas supporting public facilities. Furthermore, when transportation and public facilities are established, this will trigger the further growth of the Dutch colonial settlement area. From the results of the research, it is also known that there are three types of Dutch colonial settlements in the city of Yogyakarta based on the pattern used. The three types are open and semi-open settlement types which are intended for most Europeans, as well as closed settlement types which are intended for *amtenaar* (civil servants). The panel also found that the existence of an open space in the form of a garden or other function in the middle of the Dutch colonial settlement area was one of the factors that caused this area to be felt to have a higher and more luxurious degree compared to other residential areas because it could better guarantee the existence of better air circulation. better so that the houses around it are more comfortable to be lived.

Keywords: Dutch colonial settlements; decentralization; interpretive historical research; settlement typology

Perkembangan Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Pasca Penerapan Kebijakan Decentralisatie Wet (1903-1942)

Abstrak: Decentralisatie wet atau undang-undang desentralisasi pembangunan merupakan salah satu kebijakan berpengaruh cukup signifikan bagi pembangunan Indonesia pada masa pada masa kolonialisasi Belanda tidak terkecuali kawasan permukiman bagi orang-orang Eropa. Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana pola perkembangan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode *interpretative historical research* terhadap data-data arsip kartografi, kearsitekturan, dan tekstual yang relevan dengan tema penelitian. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pertumbuhan kawasan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta setelah penerapan *decentralisatie wet* diawali dengan kemunculan kawasan permukiman penunjang fasilitas transportasi kereta api dan disusul kemudian dengan kawasan permukiman penunjang fasilitas publik. Selanjutnya ketika fasilitas transportasi dan publik sudah mapan maka hal ini akan memicu pertumbuhan kawasan pemukiman kolonial Belanda selanjutnya. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa terdapat tiga tipe permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta berdasarkan pola bentuk yang digunakan. Ketiga tipe tersebut adalah tipe permukiman terbuka, dan semi terbuka yang diperuntukkan bagi sebagian besar orang-orang Eropa, serta tipe permukiman tertutup yang diperuntukkan bagi *amtenaar* (pegawai negeri). Paneliti juga menemukan bahwasanya adanya ruang terbuka berupa taman atau fungsi lainnya di tengah-tengah kawasan permukiman kolonial Belanda menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kawasan ini dirasa memiliki derajat yang lebih tinggi dan lebih mewah dibandingkan dengan kawasan permukiman lainnya karena dapat lebih menjamin adanya sirkulasi udara yang lebih baik sehingga rumah tinggal yang ada disekitarnya makin nyaman untuk ditinggali.

Kata kunci: permukiman kolonial Belanda; desentralisasi; *interpretative historial research*; tipologi permukiman

Artikel diterima : 23 November 2022

Artikel diperiksa : 03 April 2023

Artikel disetujui : 31 Juli 2023

Artikel dipublikasikan : 31 Juli 2023

1. Latar Belakang

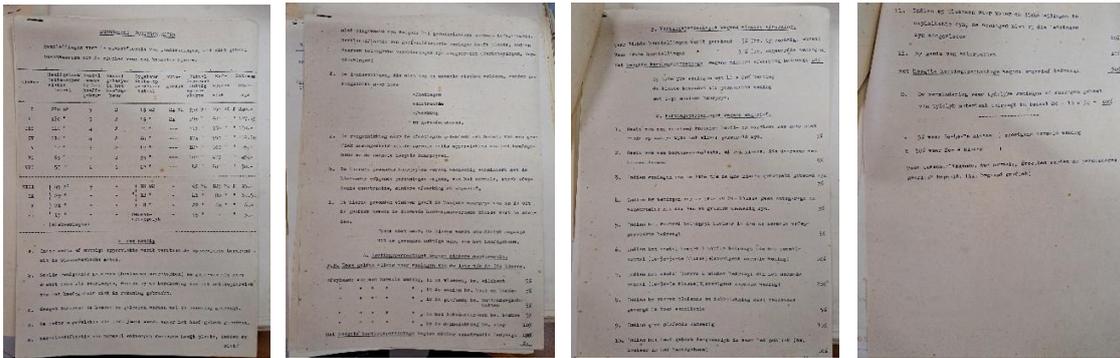
1.1. Politik Etis dan Perkembangan Arsitektur di Hindia Belanda

Kebijakan pemerintahan desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) yang dimulai pada tahun 1903 merupakan salah satu pengejawantahan dari penerapan politik etis (*Ethic Politie*) yang dimulai pada tahun 1900. Politik ini merespon kritikan Van Deventer dan didukung oleh politisi sayap kiri Belanda yang menyoroti kelalaian Kerajaan Belanda dalam memperhatikan kesejahteraan koloninya ditengah tingginya keuntungan ekonomi yang didapatkan Belanda khususnya pasca penerapan *cultuurstelsel* (1830-1870) dan UU Agraria/Liberalisasi Agraria/*agrarische wet* (mulai 1870).

Selanjutnya, dalam rangka penerapan Politik Etis, Kerajaan Belanda membentuk *De Mindere Welvaart Commissie* untuk menyelidiki sebab-sebab kemelaratan rakyat (Howard, 2002). Hasil dari penyelidikan ini menghasilkan rekomendasi perbaikan pada tiga aspek yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Namun demikian menurut Howard (2002), alih-alih berfokus pada perbaikan kualitas hidup rakyat, pelaksanaan dari Politik Etis yang kurang pengawasan dari Kerajaan Belanda dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah kolonial Belanda.

Selanjutnya melalui Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) tanggal 21 September 1866 yang tertuang dalam *Indische Staatsblad*. No. 127, pemerintah kolonial Belanda membentuk 4 buah departemen yaitu *Departement van Binnenlandsch Bestuur* (Pemerintahan Dalam Negeri), *Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid* (Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan), *Departement van Burgerlijke Openbare Werken* (Pekerjaan Umum Sipil), dan *Departement van Financiën* (Keuangan) guna lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan negara.

Dalam bidang pembangunan infrastruktur, *Departement van Burgerlijke Openbare Werken* (BOW) belum sepenuhnya berhasil karena lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menyangkut kepentingan orang-orang Eropa saja. Hal tersebut terungkap dari kritik Herman Thomas Karsten pada buku peringatan 25 tahun Undang-Undang Desentralisasi yang menjabarkan bagaimana ketimpangan kualitas bangunan dan lingkungan dengan membandingkan antara kawasan permukiman Eropa dan pribumi. Berdasarkan buku *Decentralisatie Wetgeving* yang dikeluarkan oleh *Decentralisatie Bureau, Department van Binnenlandsch Bestuur* tahun 1915, diketahui bahwasanya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kolonial Belanda setelah penerapan *Decentralisatie Wet* harus disetujui dan diawasi oleh BOW. Adapun aturan pembangunan yang kerap diacu sebagai dasar pembangunan infrastruktur di Hindia Belanda (nama resmi wilayah Indonesia pada saat penjajahan Belanda) adalah *Stadsblad* 1916 nomor 350 dan *Stadsblad* 1925 nomor 555 mengenai syarat dan ketentuan umum bangunan negara yang lebih memperhatikan konteks geografis dan klimatologis yang berbeda antara wilayah Hindia Belanda dan Eropa (Gambar 1).



Gambar 1. Rangkuman Acuan Teknis Perancangan Bangunan Negara di Residentie Madura Berdasarkan *Staadsblad* 1916 nomor 350 dan *Staadsblad* 1925 nomor 555

Sumber: ANRI, *Arsip BOW: Grote Bundel*, no. inv: 984

1.2. Perkembangan Bentuk Permukiman Kolonial Belanda di Hindia Belanda

Periode kolonialisasi Belanda di Indonesia merupakan babak modernisasi arsitektur di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut terjadi proses adaptasi, akulturasi, akomodasi, dan fusi pada bidang arsitektur dan permukiman yang dilakukan secara logis (Widodo, 2007). Keempat proses tersebut merupakan proses penyesuaian budaya bermukim orang-orang Eropa di Hindia Belanda melalui proses perancangan yang terukur dengan menggunakan pengetahuan maupun teknologi bangunan Eropa yang sebelumnya belum pernah ada.

Soekiman (2011) dan Wihardyanto (2020) menyatakan bahwasanya awal permukiman kolonial Belanda di Indonesia berada di dalam benteng. Hal tersebut dikarenakan tujuan awal Belanda di Indonesia adalah untuk menguasai perdagangan melalui VOC. Selanjutnya seiring dengan majunya perdagangan yang dijalankan VOC pada awal abad ke 17, munculah permukiman di sekitar benteng sebagai perluasan dari permukiman kolonial Belanda yang ada di dalam benteng (Passchier, 2007). Kehadiran permukiman di dalam maupun sekitar benteng membuktikan bahwasanya kebutuhan akan rasa aman tetap menjadi prioritas pada fase awal kehadiran Belanda di Indonesia.

Selanjutnya Passchier (2007) menjelaskan bahwasanya keterlibatan VOC pada politik suksesi penguasa lokal pada akhir abad ke 17 dan awal abad 18 mengakibatkan VOC memperoleh penguasaan tanah yang sangat besar khususnya di Pulau Jawa sebagai imbal balik jasa. Situasi ini kemudian turut mendorong munculnya politik tanam paksa (*cultuurstelsel*). Passchier (2007) dan Gill (1998) menerangkan bahwasanya pada masa ini tumbuh permukiman yang dipelopori hadirnya rumah-rumah perkebunan yang besar (*landhuis*) milik tuan tanah di tanah-tanah partikelir yang berlokasi jauh dari benteng.

Wihardyanto (2020) menyatakan bahwasanya pada awal abad ke 19 perkembangan permukiman kolonial di Indonesia memasuki babak baru seiring dengan kehadiran pemerintah kolonial Belanda menggantikan VOC. Dengan demikian maka Belanda menjadikan Indonesia menjadi perluasan wilayah Kerajaan Belanda (kolonisasi) sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dalam bidang perencanaan pembangunan pemukiman, kebijakan Belanda yang menonjol pada periode ini adalah *wijkenstelsel* (pemukiman berdasarkan pengelompokan ras). Menurut Passchier (2007), dan Handinoto (2010) kebijakan tersebut bertujuan untuk mengawasi pertumbuhan dan pergerakan pemukim khususnya pribumi, dan etnis China. Lebih lanjut Passchier (2007), Handinoto (2010), dan Wihardyanto (2020) menjelaskan bahwa *wijkenstelsel* senantiasa menjadi pertimbangan pembangunan permukiman pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan permukiman untuk bangsa Eropa cenderung terpisah dari permukiman etnis lain dan memiliki infrastruktur yang lebih baik.

Pembangunan permukiman semakin tertata sistematis pada awal abad ke 20 seiring dengan dikukuhkannya BOW sebagai suatu departemen mandiri yang mengurus pembangunan di Hindia Belanda (Ravesteijn, 2004). Lebih lanjut Ravesteijn (2004) menjelaskan BOW bertugas untuk mengkaji kelayakan usulan pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, serta memberikan *advice* terkait standar teknis yang diperlukan. Suparwoko (2013) menambahkan bahwa untuk pembangunan perumahan rakyat (*Volkshuisvesting*) dan perumahan negara ditangani oleh Divisi *Lands Gebouwen* dan *Pestbestrijding* (divisi penanganan wabah penyakit perkotaan) BOW. Divisi ini mengurus perumahan dan permukiman Eropa berdasarkan *Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van Openbare Werken in Indie 1941* (Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Pekerjaan Umum di Hindia Belanda Tahun 1941) serta *Indische Comptabiliteitswet* (Undang-undang Akuntabilitas). Ketimpangan standar antara permukiman untuk orang Eropa dan pribumi inilah yang menjadi kegunaan para ahli bangunan seperti yang disampaikan oleh Herman Thomas Karsten melalui tulisannya yang berjudul “*Stadebouw*” pada buku *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch Indie (1905-1930)* yang diterbitkan oleh *Vereeniging voor Locale Belangen* (Gambar 2).



Gambar 2. Buku *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch Indie* (kiri, tengah), dan Cuplikan Tulisan Ir. H.T. Karsten (kanan)

Sumber: www.delpher.nl, diakses Mei 2022

1.3. Arsitektur Permukiman di Hindia Belanda Abad ke-19 dan 20

Memasuki abad ke 19, diskusi mengenai arsitektur di Hindia Belanda semakin intens dan menuju kearah modernisasi. Hal ini disebabkan karena mulai banyak ahli bangunan yang terdidik secara formal dan menerima pengaruh modernisasi yang sedang berkembang di Eropa yang kemudian tinggal dan atau berkarya di Hindia Belanda. Dengan menggunakan pendekatan

modern, para ahli bangunan kemudian mencoba menguraikan permasalahan arsitektur di Hindia Belanda secara formal logis melalui pendekatan Eropa. Hal ini diantaranya dapat kita rasakan pada semangat yang melatarbelakangi berbagai aturan pembangunan di Hindia Belanda pada abad ke 19 dan 20.

Dalam bidang arsitektur rumah tinggal, Widodo (2007) menyatakan bahwa pada periode ini pula BOW menghasilkan berbagai model rumah tinggal yang lebih memperhatikan faktor kesehatan dan kenyamanan. Senada dengan Widodo (2007), Passchier (2007) menyatakan bahwa preferensi pembangunan hunian bagi orang Eropa di Hindia Belanda pada abad ke 19 dan 20 adalah berada di luar kota untuk memiliki lahan yang cukup guna mendapatkan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.

Setidaknya tercatat pernah diselenggarakan dua kali konggres perumahan pada tahun 1922 dan 1925 untuk membahas pemenuhan kebutuhan permukiman di Hindia Belanda. Pada konggres yang pertama pembahasan lebih fokus kepada penyediaan perumahan untuk orang-orang Eropa, sedangkan pada konggres yang kedua pembahasan lebih fokus kepada perbaikan permukiman pribumi. Pada catatan konggres tahun 1922 yang terbukukan pada *Volkshuisvestings Congres Verslag* yang diterbitkan oleh *Sociaal-Technische Vereeniging* terdapat 4 permasalahan yang dibahas. Permasalahan pertama yang dibahas adalah definisi unit rumah sehat, yang kedua adalah perencanaan perumahan yang terintegrasi dengan pengembangan kota, yang ketiga adalah aspek sosial, politik, dan finansial penunjang, dan yang keempat adalah teknis arsitektur yang diperlukan. Pada catatan konggres perumahan rakyat tahun 1922 terdapat beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan dan permukiman saat itu yaitu pembuatan model-model rumah sehat, penyediaan lahan yang cukup agar rumah memiliki lahan terbuka (pekarangan), mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk menciptakan skema percepatan pembangunan rumah untuk orang-orang Eropa, dan yang terakhir adalah mendorong penggunaan bahan bangunan modern yang mampu memangkas waktu pembangunan dan mencegah penyebaran wabah penyakit.

Berbeda dengan catatan konggres tahun 1922, catatan konggres tahun 1925 yang terbukukan pada *Volkshuisvestings Congres Verslag* memberikan gambaran bahwasanya pemerataan kualitas perumahan khususnya untuk pribumi sebagai penerima manfaat dari Politik Etis ataupun Kebijakan Desentralisasi belum terwujud (Gambar 3). Menariknya, pada konggres ini seakan-akan terdapat dua pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak yang ingin melakukan penerapan arsitektur Eropa untuk menggantikan arsitektur lokal yang rentan, dan kubu yang ingin mengkombinasikan antara kearifan lokal dengan teknologi dan material Eropa untuk memperbaiki kualitas hunian pribumi. Meskipun tampak berbeda, namun keduanya memiliki keinginan yang sama yaitu perbaikan menyeluruh terhadap kualitas hunian pribumi. Permasalahan yang dibahas pada konggres tahun 1925 menurut catatan konggres meliputi aspek tata ruang, bentuk dan material bangunan, serta *asaineering* (jalur pengelolaan air) yang perlu disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda.

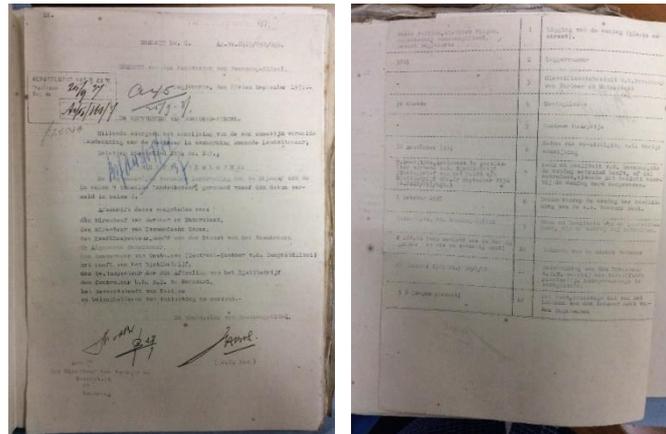


Gambar 3. Buku Volkshuisvestings-Congres 1922 (kiri), dan Buku Volkshuisvestings-Congres 1925 (kanan)

Sumber: www.delpher.nl, diakses Mei 2022

Beberapa hal menarik yang dapat ditemukan pada catatan konggres tersebut diantaranya adalah dikarenakan bentuk permukiman yang padat, beberapa rumah tinggal (umumnya bangunan pribumi dan sebagian etnis Cina) tidak dapat memisahkan bagian ruang kotor dan bersih dengan jarak yang cukup. Hal tersebut menjadikan bangunan cenderung lembab dan kurang sehat untuk penghuninya. Kondisi tersebut sering diperparah dengan penggunaan material bangunan yang tidak tahan lama dan dapat menjadi sarang hewan pengantar penyakit seperti misalnya penyakit pes yang dibawa oleh tikus. Minimnya akses air bersih dan buruknya pengelolaan air kotor dan hujan juga semakin memperburuk kondisi lingkungan permukiman dan mempercepat turunnya kualitas bangunan.

Selanjutnya memasuki tahun 1930an, pembangunan permukiman kolonial Belanda secara formal memiliki acuan perencanaan. Acuan tersebut adalah BWR 1934 (*Burgerlijke Woningregeling* 1934) yang mengatur perencanaan perumahan (*huisvesting*) terutama untuk rumah pegawai sipil (*burgerlijke landsdienaren*) (Idris, 1970). Senada dengan Idris (1970), Ravesteijn (2004) menyampaikan bahwa BWR 1934 merupakan petunjuk teknis yang merupakan kelanjutan dari *Stadsblad* 1916 nomor 350 dan *Stadsblad* 1925 nomor 555. Adapun beberapa hal yang diatur dalam BWR 1934 adalah bentuk massa rumah tinggal, perhitungan jumlah dan luas ruang bangunan di dalam lahan bangunan berdasarkan kemampuan ekonomi penghuni, serta saran material bangunan yang dipakai berdasarkan ketersediaan dan kemampuan pertukangan yang ada (Gambar 4).



Gambar 4. Contoh Ringkasan Ketetapan Bangunan Sebagai Acuan Pembangunan Berdasarkan *Burgerlijke Woningregeling* 1934

Sumber: ANRI, *Arsip BOW: Grote Bundel*, no. inv: 1538

Dalam bidang perancangan kawasan permukiman, pendekatan *garden city* (kota taman) memberikan warna baru di Hindia Belanda pada abad ke 19 dan 20. Menurut Ikaputra (2021) dalam Kurniawati (2021) ciri-ciri kota taman adalah adanya permukiman yang terpadu dan terpisah dari kawasan industri, berskala manusia, dan tersedia ruang hijau yang cukup. Ward (2014) menyatakan bahwa *garden city* merupakan wujud reformasi sosial masyarakat dalam bentuk tatanan permukiman dan perkotaan. Ward (2014) juga menyatakan bahwa modernisme yang terjadi secara massif di Eropa menimbulkan degradasi lingkungan yang menyebabkan kualitas hidup manusia menurun. Oleh karena itu Howard (1898) dalam Ward (2014) mengusulkan agar kawasan hunian berorientasi pada kebutuhan manusia diantaranya dengan meletakkan fasilitas publik berada di pusat kawasan, memperbanyak ruang hijau (baik di pusat atau diantara bangunan), serta menggunakan pola radial untuk memudahkan pencapaian terhadap fasilitas publik. Dengan demikian permasalahan kepadatan, kekumuhan, dan polusi yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia dapat teratasi (Howard, 1898). Di Yogyakarta, contoh penerapan konsep *garden city* terdapat pada kawasan permukiman Kotabaru (*Nieuw Wijk*) yang mulai dibangun pada akhir abad ke 19.

1.4. Arsitektur Rumah Tinggal Kolonial Belanda Abad 19 dan 20

Idris (1970) menerangkan bahwasanya BOW berperan penting dalam menentukan standarisasi kualitas dan proses pembangunan bangunan milik pemerintah kolonial Belanda maupun swasta di Hindia Belanda. Widodo (2007) menambahkan bahwasanya BOW mampu menghasilkan beberapa tipe rumah tinggal dengan standar penghawaan dan kesehatan yang baik.

Lebih terperinci, Norbruis (2021) menerangkan bahwasanya proses BOW dalam mengatur dan menciptakan standar bangunan kolonial di Hindia Belanda telah dimulai pada paruh pertama abad ke 19. Seperti disadur oleh Arsip Nasional Republik Indonesia pada Inventaris Arsip *Departement van Burgerlijke Openbare Werken: Seri Grote Bundel 1854-1933* yang diterbitkan tahun 2013,

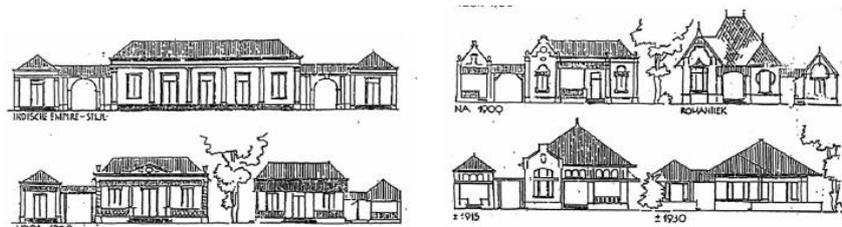
awalnya lembaga ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan *cultuurstelsel* dengan melakukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti yang diusulkan oleh Gubernur Jenderal J.J. Rochussen (1845-1851) dan didukung oleh Menteri Tanah Jajahan C.F. Pahud (1849-1856).

Namun demikian, kurangnya arsitek di Hindia Belanda pada akhir abad ke 19, BOW lantas memberikan banyak pekerjaan perancangan berskala besar di Hindia Belanda kepada firma atau biro perancangan di Belanda (Akihary, 1988). Hal inilah yang menurut Akihary (1988) sebagai pintu masuk modernisme arsitektur Eropa ke Indonesia dengan pendekatan ekletis. Lebih lanjut Akihary (1988) mengutip catatan Berlage yang berkunjung ke Hindia Belanda pada tahun 1923 bahwasanya kedatangan arsitek ke Hindia Belanda membawa perubahan cara pandang berarsitektur dengan pendekatan modernisme yang berusaha memurnikan kembali arsitektur secara konstruktif. Berlage mencontohkan bentuk-bentuk klasik tradisional digantikan oleh realisasi konsep bentuk yang lebih sederhana dan rasional.

Memasuki abad ke 20, kondisi ekonomi Belanda mulai pulih dan meningkat pasca penerapan *cultuurstelsel* dan *agrarische wet*. Banyaknya pihak swasta yang kemudian menanamkan modal di Hindia Belanda, dan hal ini berimbas pula pada gaya arsitektur bangunan yang ada di Hindia Belanda. Norbuis (2021) memaparkan bahwasanya pendekatan ekletisisme banyak dipilih untuk mengekspresikan diri meskipun secara intrinsik masih menerapkan pendekatan modernism pada perancangannya.

Berdasarkan uraian Norbuis (2021), majalah *Bouwkundig Weekblad* tahun 1885 pernah mengulas fenomena ekletisisme di Hindia Belanda. Menurut *Bouwkundig Weekblad*, ekletisisme yang diterapkan tetap menonjolkan fungsionalisme pada tata ruang dalam bangunan. Sedangkan pada bagian luar bangunan, desain dan dekorasi yang digunakan menyesuaikan karakter dan fungsi bangunan melalui penggunaan elemen-elemen masa lampau yang kontekstual namun tetap menonjolkan teknik konstruksi modern dalam pembangunannya. Norbuis (2021) mencontohkannya dengan banyaknya penggunaan kolom-kolom besar berwarna putih bergaya Doric atau Ionic yang terbuat dari semen *Portland* pada bagian fasade bangunan.

Senada dengan pernyataan Norbuis (2021), Nix (1949) menggarisbawahi prinsip ekletis yang diterapkan oleh Belanda dalam pembangunannya di Hindia Belanda menghasilkan klasifikasi gaya arsitektur rumah tinggal kolonial Belanda di Indonesia menjadi 6 berdasarkan bentuk fasadnya. Keenam gaya arsitektur tersebut adalah *Indisch Empire Style, Voor 1900, NA 1900, Romantiek, ±1915, ±1930* (Gambar 5). Gaya arsitektur *Indisch Empire Style, Voor 1900, NA 1900*, dan *Romantiek* banyak terpengaruh arsitektur barat klasik pada fasadenya. Berbeda gaya arsitektur ±1915 dan ±1930 yang mulai terpengaruh arsitektur modern di Eropa meskipun masih menggunakan pendekatan arsitektur ekletis.



Gambar 5. Ragam Gaya Arsitektur Rumah Tinggal Kolonial Belanda di Indonesia

Sumber: Nix (1949)

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijabarkan maka dapat diketahui bahwasanya penerapan kebijakan desentralisasi mempengaruhi pembangunan permukiman dan arsitektur rumah tinggal di Indonesia secara umum, dan Yogyakarta sebagai salah satu kota penting di Jawa pada masa kolonialisasi Belanda di Indonesia tentunya juga terpengaruh hal tersebut. Oleh karena itu maka dengan menggunakan metode *historical interpretative research* terhadap arsip-arsip kartografi maupun kearsitekturan yang menyinggung mengenai perkembangan permukiman di Kota Yogyakarta, penulis mencoba menguraikan proses dan faktor-faktor penyebab perkembangan permukiman di Kota Yogyakarta pasca penerapan kebijakan desentralisasi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deduktif dengan pendekatan *historical interpretative research*. Dengan pendekatan ini, peneliti mencoba untuk merekonstruksi perkembangan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta setelah penerapan *desentralisatie wet* pada tahun 1903 hingga berakhirnya kolonialisasi Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Rentang waktu ini dianggap menarik karena pada waktu ini secara terstruktur pembangunan permukiman kolonial Belanda di Indonesia berkembang pesat. Sedangkan kenapa Kota Yogyakarta menarik untuk dijadikan lokasi penelitian karena statusnya sebagai *landscappen besturden* (diakui kewilayahannya dan memiliki otonomi untuk mengelola daerahnya) yang hanya dimiliki oleh Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman yang merupakan turunan dari Kerajaan Mataram Islam. Status khusus tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan daerah lain karena pihak pemerintah kolonial Belanda perlu mendapatkan persetujuan proyek dan penggunaan tanah kepada penguasa lokal di atas. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan kompensasi sewa atas penggunaan tanah tersebut.

Menurut Groat & Wang (2002), perkembangan arsitektur dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan *interpretive historical research* melalui pemahaman pola. Creswell (2007) menambahkan pola-pola yang muncul tersebut dirajut secara *time series* sehingga membentuk suatu narasi sejarah yang komprehensif. Groat & Wang (2002) menambahkan pula bahwasanya konteks kesejarahan yang muncul disekitar fenomena perlu juga untuk diamati agar dapat menjadi katalisator untuk pemaknaan.

2.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan arsip dan survei lapangan. Adapun arsip yang digunakan sebagai data primer adalah arsip tekstual, kartografi dan kearsitekturan mengenai bangunan rumah tinggal kolonial Belanda di Kota Yogyakarta. Arsip tersebut dikumpulkan melalui instansi formal pengelola arsip seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Arsip Nasional Republik Indonesia, maupun instansi informal melalui komunitas pecinta sejarah. Setelah data-data primer dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan survei lapangan terhadap kawasan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta untuk melakukan pemotretan serta wawancara kepada sesepuh untuk mengumpulkan hal-hal yang dapat memperkaya pembahasan.

2.2. Metode Analisis Data

Data-data berupa arsip tekstual selanjutnya dikaji dengan menggunakan metode analisis konten untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pembangunan permukiman kolonial Belanda di Indonesia pada umumnya dan Kota Yogyakarta pada khususnya. Berbeda dengan arsip tekstual, arsip kartografi (peta) yang dapat dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara time series untuk menemukan lokasi-lokasi pertumbuhan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta pada rentang waktu penerapan *desentralisatie wet* (1903-1942). Agar semakin presisi dalam menggambarkan perkembangan permukiman kolonial Belanda di Indonesia, arsip kartografi tersebut dilengkapi dengan arsip-arsip kearsitekturan yang memiliki skala yang lebih detail. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pola perkembangan permukiman kolonial Belanda di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Setelah pola dan faktor-faktor yang melatarbelakangi perkembangan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta diketahui selanjutnya peneliti merajut lokasi-lokasi pembangunan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya pada rentang waktu yang ditentukan secara time series, serta menuliskan kembali dalam bentuk narasi komprehensif dengan memberikan pemaknaan di dalamnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertumbuhan Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1903-1942

Dari hasil penelusuran terhadap peta-peta lama Kota Yogyakarta, diketahui terdapat 4 peta yang menggambarkan keadaan Kota Yogyakarta antara tahun 1903-1942. Peta tersebut berjudul *Plattegrond van de Hoofdplaats Jogjakarta* yang diterbitkan pada tahun 1903, *Jogjakarta en Omstreken* yang diterbitkan pada tahun 1925, *Hoofdplaats Djokjakarta Aangeboden Door Nillmij* yang diterbitkan pada tahun 1930, serta *Jogjakarta* yang diterbitkan pada tahun 1935.

Dari peta tahun 1903 (Gambar 6) didapatkan gambaran awal lokasi permukiman kolonial Belanda di Yogyakarta pada awal abad ke 20 khususnya pada permulaan penerapan *decentralisatie wet* tahun 1903. Permukiman-permukiman tersebut umumnya masih terletak di kawasan pusat kota dan sekitarnya meliputi Kawasan Loji Kecil, Secodiningratan/*Kampeemenstraat*, *Kantoorlaan* (sekarang Jl. Reksobayan), dan sebelah Timur *Toegoe Straat / Wetan Toegoe* (sekarang Jl. Marga Utama) yang berada pada wilayah *Negara Kasultanan Yogyakarta*, serta Kawasan Bintaran, *Gevangenislaan*, dan sekitar Stasiun Lempuyangan yang berada di sekitar wilayah *Negaragung Kasultanan Yogyakarta*. Dari Surjomihardjo (2008), dan Darmosugito (1956) diketahui bahwasanya permukiman tersebut sebagian besar dihuni oleh personel militer dan pegawai pemerintah kolonial Belanda. Hanya kawasan Loji Kecil dan Timur *Toegoe Straat* yang diperuntukkan untuk selain personel militer dan pegawai pemerintahan kolonial Belanda dimana Surjomihardjo (2008), dan Darmosugito (1956) menerangkan bahwasanya di kawasan tersebut banyak berdiri toko-toko dan perkantoran milik Belanda.



Gambar 6. (a) Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1903. (b) Perkembangan Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1925

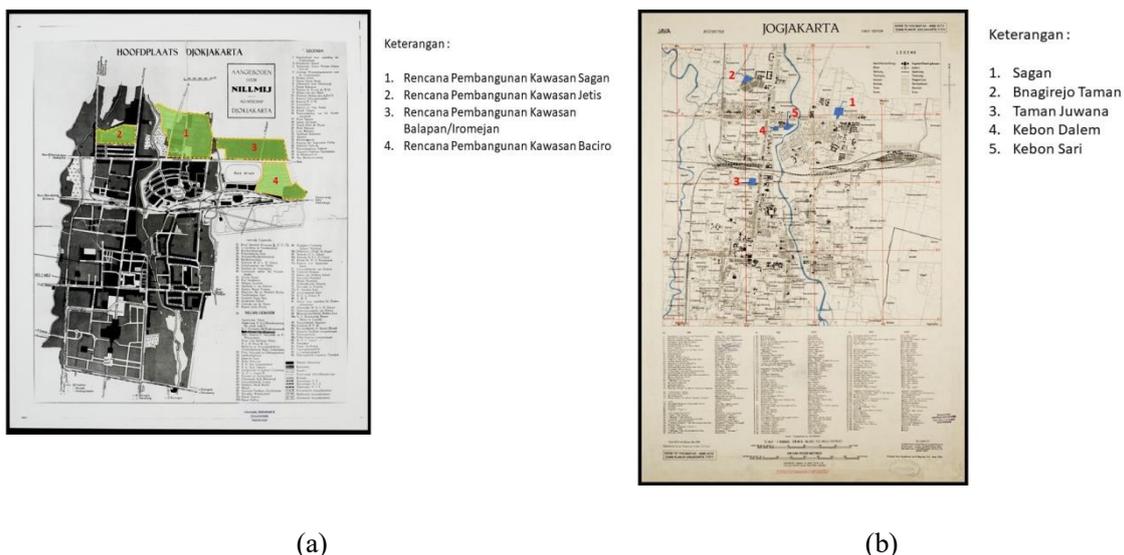
Sumber: <http://colonialarchitecture.eu/> diakses Mei 2020

Selanjutnya jika kita bandingkan antara peta tahun 1903 dengan tahun 1925 kita dapat mengetahui bahwasanya terjadi pembangunan yang cukup pesat di Kota Yogyakarta (Gambar 7). Hal ini disinggung pula oleh Surjomihardjo (2008) yang menerangkan bahwa pada kisaran tahun 1920-1930 di Kota Yogyakarta banyak berdiri fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Tentunya hal ini akan meningkatkan jumlah permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta. Darmosugito (1956) menambahkan bahwasanya pada kisaran tahun ini masyarakat Kota Yogyakarta sudah mulai menikmati listrik, air ledeng, serta sudah dibangun beberapa pekerjaan *asainering* kota yang belum tentu dapat dinikmati di kota-kota lain.

Pada peta tahun 1925 tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya muncul kawasan-kawasan permukiman kolonial Belanda baru di Kota Yogyakarta. Kawasan terbesar yang muncul sebagai kawasan permukiman kolonial adalah *Nieuw Wijk* (Kotabaru). Kawasan ini merupakan kawasan permukiman umum untuk orang-orang Eropa yang terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas publik didalamnya seperti sekolah dan rumah sakit, serta mencirikan *garden city* seperti yang disampaikan oleh Kesuma (2016). Kesuma (2016) juga menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa ruang terbuka di Kawasan Kotabaru dimana ruang terbuka tersebut terletak di simpul-simpul jalan.

Selain Kawasan Kotabaru, kita juga dapat melihat bahwasanya tumbuh beberapa kawasan permukiman kolonial Belanda lain yang juga terkait dengan fasilitas-fasilitas publik yaitu kawasan permukiman kolonial Belanda di *Kweekschool Laan* yang dekat dengan *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers*, kawasan perumahan dinas pegawai *Centraal Werkplaats* (bengkel kereta api) di Pengok Klitren yang berdiri tahun 1914, serta kawasan perumahan dinas pegawai *Staatsspoorwegen* di Sitisewu dan Wongsodirjan (dekat dengan Stasiun Tugu Yogyakarta) yang berdiri pada 1887. Dari ketiga kawasan permukiman kolonial Belanda di atas, perumahan dinas pegawai *Staatsspoorwegen* di Sitisewu dan Wongsodirjan cukup menarik karena kawasan tersebut tidak muncul pada peta tahun 1903 dan baru tampak pada peta tahun 1925. Dengan demikian sangat mungkin pembangunan perumahan dilakukan setelah stasiun selesai dibangun untuk menunjang aspek operasional.

Pada peta tahun 1930 tidak tampak adanya kawasan permukiman kolonial Belanda baru di Kota Yogyakarta, namun demikian kita dapat melihat beberapa perencanaan pembangunan kawasan permukiman yang diduga kuat diperuntukkan bagi masyarakat Eropa (Gambar 8). Dikarenakan peta ini merupakan peta yang diperuntukkan bagi NILLMIJ (*Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en Lijfrente-Maatschappij*) yang merupakan sebuah perusahaan asuransi milik Belanda, sangat dimungkinkan pembangunan tersebut akan diasuransikan ke NILLMIJ. Kawasan tersebut terletak di bagian Utara dan Timur Laut Kota Yogyakarta, yang jika di-*overlap*-kan dengan peta saat ini, rencana pembangunan tersebut terletak di Kawasan Sagan, Kawasan Jetis, Kawasan Balapan / Iromejan, dan Kawasan Baciro. Rencana pembangunan tersebut digambarkan dengan garis putus-putus pada peta.



(a) (b)
Gambar 8. (a) Rencana Pengembangan Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1930. (b) Perkembangan Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1935

Sumber: <http://colonialarchitecture.eu/> diakses Mei 2020

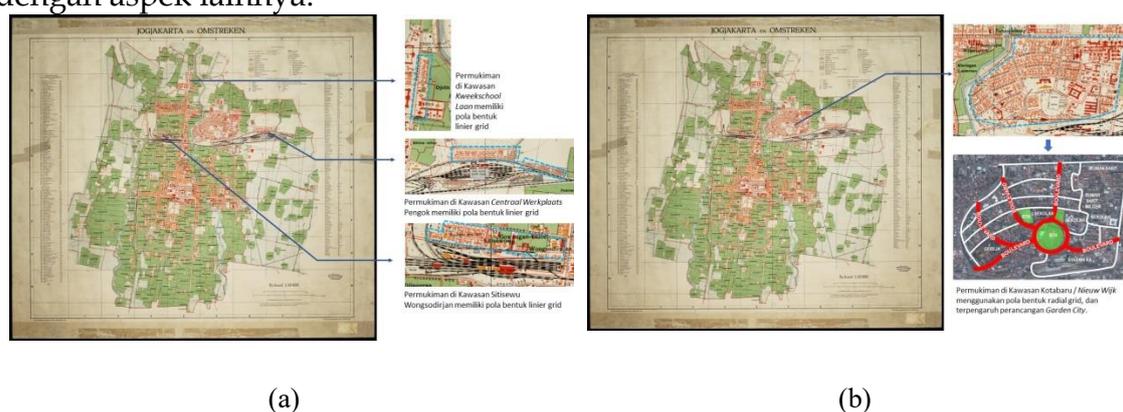
Selanjutnya pada peta tahun 1935, tampak beberapa kawasan permukiman kolonial Belanda baru di Kota Yogyakarta (Gambar 9). Kawasan permukiman tersebut memiliki karakteristik yang khas dimana lebih menyerupai kawasan perumahan yang menempel pada jalan utama perkotaan, memiliki pola jalan kuldesak dan memiliki ruang terbuka publik di bagian tengah berupa taman. Kawasan tersebut diantaranya adalah Kawasan Sagan, Kawasan Bangirejo Taman, Taman Juwana, Kawasan Kebon Dalem, dan Kawasan Kebon Sari. Dari hasil penelusuran arsip diketahui bahwa beberapa kawasan permukiman tersebut diperuntukkan bagi pegawai pemerintahan kolonial Belanda (*amtenaar*). Hal tersebut diperkuat dengan masih ditemukannya plakat ANRI pada beberapa bangunan rumah tinggal di Sagan dan Bangirejo Taman (Wihardyanto, 2020). Hal ini selaras dengan pernyataan Suparwoko (2013) yang menerangkan bahwa pada periode tahun 1930an penyediaan perumahan oleh pemerintah kolonial Belanda lebih difokuskan untuk memfasilitasi pegawai pemerintahan.

Dari beberapa paragraf di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya pertumbuhan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta terkait dengan pertumbuhan transportasi umum kereta api dan fasilitas publik, serta pemenuhan terhadap kebutuhan perumahan untuk pegawai pemerintahan kolonial Belanda.

3.2. Bentuk Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1903-1942

Dari sub bab sebelumnya, kita telah mengetahui bahwasanya pada rentang waktu tahun 1903-1925 bertumbuh 4 buah kawasan permukiman yaitu Kawasan Kotabaru, *Kweekschool Laan*, Kawasan Pengok Klitren, serta Kawasan Sitisewu dan Wongsodirjan. Dari Gambar 10, kita dapat melihat keempat kawasan diatas memiliki 2 pola bentuk dasar yaitu linier (*Kweekschool Laan*, Kawasan Pengok

Klitren, serta Kawasan Sitisewu dan Wongsodirjan) dan radial (Kawasan Kotabaru). Namun demikian kedua pola bentuk tersebut dipadukan dengan pola grid agar lebih efisien dalam hal jumlah rumah yang dapat dibangun. Pola bentuk linier dapat kita jumpai pada *Kweekschool Laan*, Kawasan Pengok Klitren, serta Kawasan Sitisewu dan Wongsodirjan. Sedangkan pola bentuk radial dapat kita jumpai pada Kawasan Kotabaru. Selain dari jumlah bangunan rumah yang perlu diwadahi pada suatu kawasan, perbedaan pola bentuk permukiman juga disebabkan oleh ada atau tidaknya ruang dan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan. *Kweekschool Laan*, Kawasan Pengok Klitren, serta Kawasan Sitisewu dan Wongsodirjan pada awalnya adalah merupakan area permukiman yang diperuntukkan untuk rumah-rumah dinas. Dengan demikian maka aspek ekonomika pembangunan tentunya menjadi pertimbangan utama dibandingkan dengan aspek lainnya.



Gambar 10. (a) Pola Linear Grid Pada Permukiman Kolonial Belanda *Kweekschool Laan*, *Centraal Werkplaats*, dan Sitisewu Wongsodirjan di Kota Yogyakarta. (b) Pola Radial Grid Pada Permukiman Kolonial Belanda Kotabaru di Kota Yogyakarta

Sumber: <http://colonialarchitecture.eu/> diakses Mei 2020

Hal tersebut berbeda dengan Kawasan Kotabaru yang menerapkan pola bentuk radial yang dipadukan dengan grid (Gambar 11). Dengan menerapkan pola bentuk radial yang dipadukan dengan grid maka diduga selain untuk mendapatkan jumlah bangunan rumah yang cukup, pola bentuk radial akan memperpendek jarak pencapaian antara rumah ke fasilitas publik. Penggunaan pola bentuk radial yang dipadukan dengan grid juga akan menyediakan area pusat yang dapat menjadi landmark atau penanda kawasan serta area-area terbuka yang dapat dimanfaatkan dari area sekitaran perpotongan jalan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan bangunan rumah tinggal.

Selanjutnya dari perbandingan peta antara tahun 1925 dengan 1930 kita dapat melihat adanya 4 buah rencana kawasan baru yang diduga kuat merupakan kawasan permukiman ditinjau dari bentuknya. Keempat kawasan tersebut adalah Kawasan Sagan, Jetis, Balapan / Iromejan, dan Baciro. Kawasan-kawasan tersebut menggunakan pola bentuk linier yang dipadukan dengan grid untuk mengatur tata letak area permukiman dan sirkulasinya. Diduga

penggunaan pola bentuk grid adalah untuk memaksimalkan jumlah rumah tinggal sekaligus mengefisienkan sirkulasi yang akan dibangun.

Selanjutnya dari peta tahun 1935 diketahui bahwa keempat rencana kawasan permukiman seperti yang disebutkan pada paragraf di atas tidak semuanya dibangun. Hanya ada 1 buah kawasan permukiman baru yang dibangun atau tampak pada peta tahun 1935 yakni Kawasan Jetis. Menariknya, kawasan Jetis tidak menampilkan desain permukiman yang sama dengan yang ditampilkan pada peta tahun 1930 namun tetap menggunakan pola bentuk linear grid. Permukiman Jetis sendiri dibangun disepanjang *Juliana Laan* yang menghubungkan *Kweekschool Laan* dan *Magelangsche Weg*. Selanjutnya ketiga kawasan permukiman lainnya yang tampak pada peta tahun 1930 yakni Sagan, Iromejan, dan Baciro diduga dibangun setelah tahun 1935 karena tidak tampak pada peta 1935.

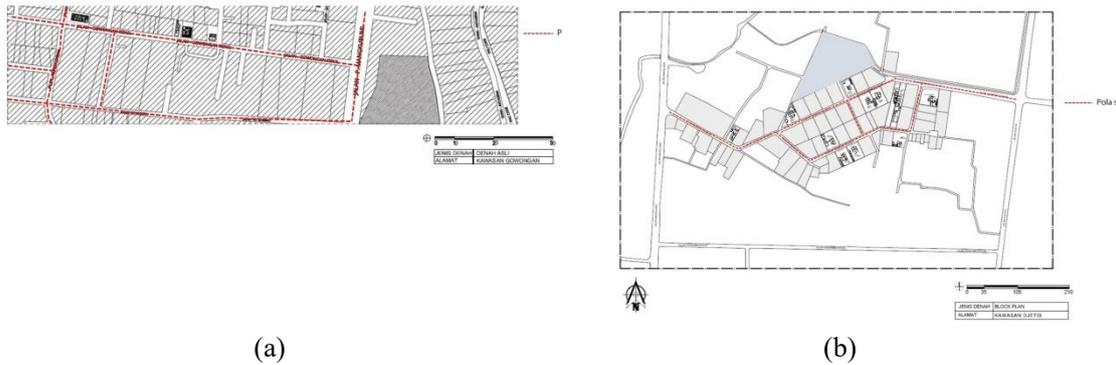
Jika mengacu pada penelusuran arsip dan bentuk fisik bangunan yang masih tersisa, peneliti menduga kuat Kawasan Sagan dan Baciro dibangun berdekatan dengan periode kolonialisasi Belanda di Indonesia karena masih terdapat arsip-arsip gambar denah bangunan rentang waktu tahun 1939-1963 milik Djawatan Harta Peninggalan Belanda (sebuah badan khusus dibawah Departemen Keuangan yang mengurus aset-aset peninggalan Belanda di Indonesia) yang tersimpan di Dinas Kearsipan Kota Yogyakarta. Sedangkan Kawasan Iromejan diduga mulai dibangun setelah tahun 1963 karena tidak ditemukannya arsip-arsip gambar denah bangunan pada koleksi arsip yang sama di atas.

Pada peta tahun 1935 pula peneliti mengetahui bahwasanya terdapat 4 kawasan permukiman kolonial Belanda baru yaitu Kawasan Bangirejo Taman, Taman Yuwono, Kebon Dalem, dan Kebon Sari. Keempat kawasan tersebut memiliki pola bentuk yang serupa yakni pola bentuk radial dengan ciri khas adanya taman atau ruang terbuka dibagian tengah kawasan meskipun jumlah rumah tinggal yang ada di dalam kawasan berbeda-beda. Meskipun menggunakan pola bentuk radial, namun kawasan-kawasan tersebut tidak menerapkan grid karena luas lahan yang tidak besar dan jumlah rumah tinggal yang tidak banyak (eksklusif).

3.3. Karakteristik Permukiman Kolonial Belanda di Kota Yogyakarta Tahun 1903-1942

Berdasarkan penjelasan pada sub bab 3.1 dan 3.2, peneliti berpendapat bahwasanya terdapat 3 karakteristik permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta pada rentang waktu 1903-1942. Tipe pertama adalah tipe permukiman terbuka yang memiliki pola bentuk permukiman linear, atau linear grid (Gambar 12 dan 13). Tipe ini dapat kita jumpai pada Kawasan *Kweekschool Laan*, Kawasan Pengok Klitren, Kawasan Sitisewu dan Wongsodirjan, serta Kawasan Jetis. Tipe kedua adalah tipe permukiman semi terbuka yang memiliki pola bentuk permukiman radial grid. Tipe ini dapat kita jumpai pada Kawasan Kotabaru / *Nieuw Wijk*. Tipe terakhir atau tipe ketiga adalah tipe permukiman tertutup yang memiliki pola bentuk permukiman radial. Tipe ini dapat kita jumpai pada Kawasan Kawasan Bangirejo Taman, Taman Yuwono, Kebon

Dalem, Kebon Sari, dan Sagan.

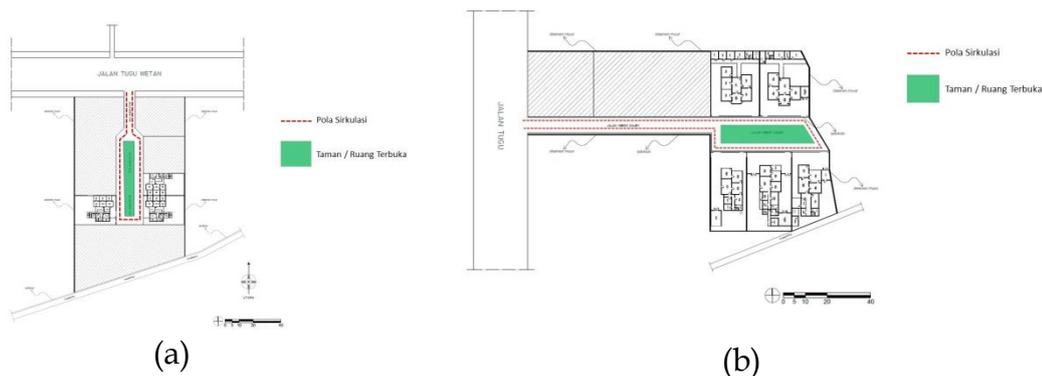


Gambar 12. (a) Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Sitisewu dan Wongsodirjan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950. (b) Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Jetis di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950.

Sumber : peneliti (2022)

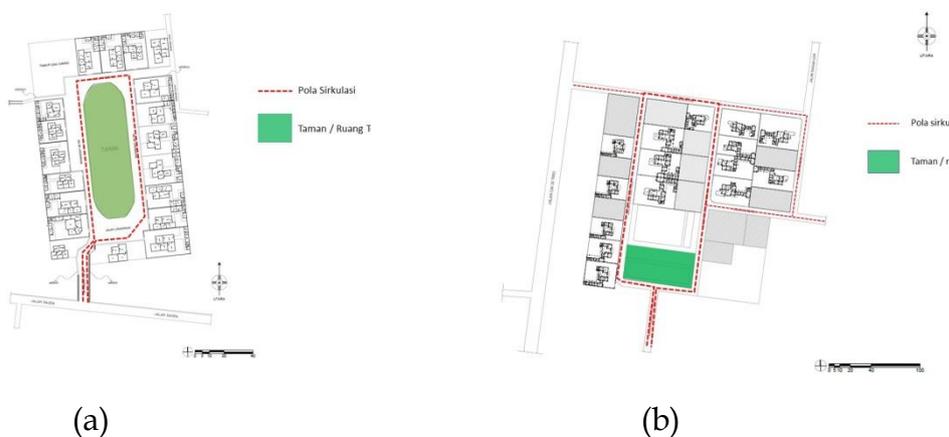
Adapun yang mendasari perbedaan antara ketiga tipe yang dijelaskan pada paragraf di atas adalah pola akses keluar masuk kawasan, dan pola sirkulasi di dalam kawasan. Pada tipe pertama, terdapat beberapa akses keluar masuk kawasan sehingga penghuni dapat keluar dan masuk dari arah yang berbeda. Selain itu pola sirkulasi di dalam kawasan cenderung bebas mengikuti pola bentuk grid yang ada. Selanjutnya pada tipe kedua, penghuni tetap dapat keluar dan masuk kawasan dari arah yang berbeda, namun pola sirkulasi yang ada di dalam kawasan tersebut relatif lebih terarah dikarenakan ada pusat orientasi yang jelas sebagai konsekuensi dari penggunaan pola bentuk radial. Pada tipe terakhir yaitu tipe permukiman tertutup, penghuni hanya dapat keluar masuk kawasan pada satu akses saja, selain itu pola sirkulasi yang ada di dalam kawasan cenderung tidak bebas karena penghuni harus mengelilingi kawasan untuk keluar dan masuk (Gambar 14 sampai dengan 17). Meskipun tampak kurang fleksibel dalam pola sirkulasinya, namun tipe permukiman ketiga memiliki tingkat keamanan kawasan yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe permukiman yang lain karena semua pergerakan akan terkontrol dan terawasi.

Selain dari segi fisik, peneliti juga menemukan suatu sistem penamaan kawasan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta yang menarik. Secara umum penamaan kawasan (toponim) permukiman kolonial Belanda di Indonesia adalah menyesuaikan nama daerah setempat, ataupun nama bangunan umum yang paling utama di kawasan tersebut. Tipe permukiman yang menggunakan toponim ini adalah tipe satu dan dua. Namun pada tipe tiga peneliti menemukan kecenderungan toponim kawasan yang mengarah kepada penekanan adanya taman atau sejenisnya seperti misalnya kebon/kebun yang intinya merujuk pada adanya suatu ruang terbuka di bagian tengah kawasan sebagai elemen karakteristik yang khas.



Gambar 14. (a). Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Kebon Sari di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950. (b) . Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Kebon Dalem di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950.

Sumber: peneliti (2022)



Gambar 16. (a) Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Taman Yuwono di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950. (b) Pola Sirkulasi dan Lahan Terbuka Pada Permukiman Kolonial Belanda Sagan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Rekonstruksi Peta dan Denah Bangunan tahun 1950.

Sumber: peneliti (2022)

Adanya taman (*plein*) yang berada di tengah-tengah kawasan permukiman merupakan pengaruh dari *Garden City* yang tengah menjadi tren perencanaan maupun perancangan kota dan kawasan di Eropa dan Amerika pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Taman atau ruang terbuka menjadi elemen penanda kawasan yang menyiratkan adanya kelebihan kawasan permukiman tersebut jika dibandingkan dengan kawasan permukiman lainnya karena dapat lebih menjamin kesehatan dan kenyamanan rumah tinggal yang ada di sekitarnya selain dapat pula digunakan sebagai fasilitas rekreasi dan berkumpul. Dengan

demikian besar kemungkinannya penggunaan ruang terbuka dibagian tengah pada Kawasan Kotabaru, Bangirejo Taman, Taman Yuwono, Kebon Dalem, Kebon Sari, maupun Sagan memiliki makna yang serupa meskipun luasan ruang terbukanya tidak sama. Hal ini juga dapat menjadi penanda bahwasanya penghuni rumah tinggal yang ada di dalam permukiman ini memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan masyarakat yang lain. Pernyataan ini berkesesuaian dengan Surjomihardjo (2008), dan Soekiman (2011) yang menyatakan bahwasanya golongan militer dan pegawai negeri pada masa kolonisasi Belanda di Indonesia menduduki strata sosial yang tinggi sejajar dengan ningrat pribumi disusul selanjutnya oleh pengusaha Eropa maupun pegawai perusahaan Eropa yang memiliki posisi penting.

Selanjutnya dari pengamatan lapangan dan analisis yang dilakukan, adanya jalan penghubung (konektor) antara jalan utama dengan jalan lingkungan di dalam kawasan juga menjadi elemen pembeda yang penting antara kawasan permukiman bagi *amtenaar* dan lainnya. Jika diamati lebih lanjut, jalan penghubung (konektor) tersebut terbentuk karena kawasan permukiman untuk *amtenaar* ini perlu mendapatkan kemudahan utilitas yang bisa didapatkan dari jalan utama didekatnya yakni *Prinses Juliana Laan* untuk Bangirejo Taman, Malioboro dan Dagen untuk Taman Yuwono, Jalan Margo Utomo untuk Kebon Dalem, serta Jalan Gondolayu untuk Kebon Sari dan Sagan namun ingin mendapatkan tingkat keamanan yang tinggi dengan kemudian memasukkan kawasan permukimannya sedikit lebih kedalam atau tidak berada ditepi jalan utama.

4. Kesimpulan

Adanya penerapan Politik Etis dan disusul kemudian dengan *Decentralisatie Wet* membawa pertumbuhan permukiman kolonial Belanda yang cukup signifikan terutama di Kota Yogyakarta. Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan kawasan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta yang cukup signifikan.

Decentralisatie Wet juga memicu pertumbuhan fasilitas transportasi dan disusul kemudian dengan kawasan permukiman penunjang fasilitas publik. Kedua hal tersebut yakni fasilitas transportasi dan fasilitas publik, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kawasan permukiman. Jika kedua fasilitas tersebut sudah mapan maka kemudian akan memicu pertumbuhan wilayah yang lebih pesat. Hal ini terbukti dengan munculnya kawasan permukiman Kotabaru yang merupakan kawasan permukiman kolonial Belanda terbesar di Kota Yogyakarta dan kawasan-kawasan permukiman khusus untuk *amtenaar* diberbagai tempat di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, pertumbuhan kawasan permukiman kolonial Belanda di Kota Yogyakarta memunculkan 3 tipe permukiman berdasarkan pola bentuk yang digunakan. Ketiga tipe tersebut adalah tipe permukiman terbuka, dan semi terbuka yang diperuntukkan bagi sebagian besar orang-orang Eropa, serta tipe permukiman tertutup yang diperuntukkan bagi *amtenaar*.

Adanya ruang terbuka berupa taman atau fungsi lainnya di tengah-tengah

kawasan permukiman kolonial Belanda menjadi elemen yang cukup penting bagi kesehatan dan kenyamanan. Ruang terbuka tersebut menjamin sirkulasi udara semakin baik sehingga rumah tinggal yang ada disekitarnya makin nyaman ditinggali. Hal inilah yang kemudian diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kawasan permukiman Belanda dirasa memiliki derajat yang lebih tinggi dan lebih mewah jika dibandingkan dengan kawasan permukiman lainnya selain tentunya sanitasi dan fasilitas publik yang relatif lebih lengkap.

5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih diucapkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas izin yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengkaji arsip kartografi, kearsitekturan, dan tekstual yang mendukung untuk terselenggaranya penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Akihary, Huib. (1988). *Architectuur And Stadebouw in Indonesie 1870-1970*. Zupthen: De Walburg Pers.
- Birch, Eugenie Ladner. (2002). *Having a Longer View on Downtown Living*. Journal of The American Planning Association, Volume 68, No.1, Hal. 5-21.
- Cresswell, John. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches*. London, United Kingdom: The Sage Publications.
- Darmosugito. (1956). Kota Yogyakarta 200 Tahun: 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956. Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.
- Gill, Ronald. (1998). "Country Houses in the 18th Century." In *Indonesian Heritage Book 6: Architecture*. Singapore: Archipelago Press.
- Groat, Linda., Wang, David. (2002). *Architectural Research Method*. New York: John Wiley & Sons Publishing.
- Handinoto. (2010). *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa Pada Masa Kolonial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Howard, Dick (2002). *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000*. Ohio: Ohio University Press.
- Howard, Ebenezer. (1898). *To-morrow: A Peacefull Path to Real Reform*. London: Swan Sonnenschein and Co.
- Idris, Irdam. (1970). *Sejarah Perkembangan Pekerjaan Umum di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
- Kesuma, Yunita. (2016). *Land Use dan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kotabaru Yogyakarta, Berdasarkan Konsep Garden City*. Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman (LOSARI), Volume 1, No. 2, Hal. 117-122.
- Kurniawati, Wakhidah. (2021). *Penerapan Konsep Garden City di Kawasan CandiBaru Semarang*. JAZ: Jurnal Arsitektur Zonasi, Volume 4, No.3, Hal. 410-416.
- Nix, Charles Thomas. (1949). *De Vormleer Van De Stedegebouw in Het Bijzonder Voor Indonesia*. The Netherland: Doctoral Dissertation Technische

- Hoogeschool Delft.
- Norbruis, Obbe. (2021). *Arsitektur di Nusantara: Para Arsitek dan Karya Mereka di Hindia Belanda dan Indonesia Pada Paruh Pertama Abad ke-20*. Belanda: Stichting Hulswit Fermont Cuypers.
- Passchier, Cor. (2007). "Arsitektur Kolonial Di Indonesia Rujukan dan Perkembangan." In *Masa Lalu Dalam Masa Kini: Arsitektur Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ravesteijn, Wim. Kop, Jan. (2004). *Bouwen in de Archipel: Burgerlijke Openbare Werken in Nederlands-Indie en Indonesie 1800-2000*. Zupthen: De Wallburg Pers.
- Sidharta, Amir. (2012). "Ketengangan Dan Perdebatan Dalam Sejarah Arsitektur Modern Indonesia." In *Tegang Bentang Seratus Tahun Perspektif Arsitektural di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Silas, Johan. (2005). "Perjalanan Panjang Perumahan Indonesia Dalam dan Sekitar Abad XX." In *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta: NIOD Netherlands- Penerbit Ombak.
- Soekiman, Djoko. (2011). *Kebudayaan Indis Dari Jaman Kompeni Sampai Revolusi*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Suparwoko. (2013). *Peningkatan Kapasitas Perumahan Swadaya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Surjomihardjo, Abdurrahman. (2008). *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, Sejarah Sosial 1880- 1930*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Utomo, C.B. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia: Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Ward, Colin. Hall, Peter. (2014). *Sociable Cities: The 21st Century Reinvention of The Garden City*. London: Routledge.
- Widodo, Johannes. (2007). "Arsitektur Indonesia Modern: Transplantasi, Adaptasi, Akomodasi, dan Hibridisasi." In *Masa Lalu dalam Masa Kini: Arsitektur di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wihardyanto, Dimas. Ikaputra. (2020). Studi Karakteristik Ruang Pada Bangunan Rumah Tinggal Kolonial Di Kawasan Bangirejo Taman Yogyakarta. *NATURE: National Academic Journal of Architecture*, Volume 7, No. 2, Hal. 220-240.